

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena pariwisata dapat berkontribusi memberikan pendapatan yang besar dalam suatu wilayah khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai banyak sekali keindahan alam diberbagai daerah. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi obyek pariwisata yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Tidak heran banyak daerah di Indonesia yang berbondong-bondong meningkatkan infrastruktur khususnya di bidang pariwisata. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan wisata pada sebesar 20 juta jiwa untuk wisatawan mancanegara, sedangkan untuk wisatawan lokal ditargetkan sebesar memiliki pergerakan mencapai 275 jiwa yang menyebabkan indeks daya saing pariwisata Indonesia menempati peringkat 30 (Thalib & Ridha, 2019)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa:

“Pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dengan banyaknya masyarakat yang bergantung pada pariwisata dalam menjalankan perekonomian mereka, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan yang berfungsi untuk meningkatkan infrastruktur di bidang pariwisata guna meningkatkan jumlah wisatawan yang datang dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan.”

Dalam hal ini, pengembangan pariwisata tidak hanya fokus ke dalam peningkatan kualitas objek, pengembangan daya tarik objek wisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di lingkungan masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata ini tentunya harus bisa mempertahankan kebermanfaatan pariwisata bagi masyarakat dengan jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan meskipun telah mendapatkan perhatian dari para ahli di bidang pariwisata, namun dalam menghubungkan pariwisata dengan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi satu pemahaman dan paradigma masih belum berhasil, sehingga hal ini membuat para ahli menjadi tertarik untuk mendiskusikan konsep tersebut. Menurut pendapat Nurhidayati, (2007) menjelaskan definisi pembangunan berkelanjutan dengan berbagai makna yang bervariasi. Fokus utama dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah mengenai permasalahan sosial, kebutuhan perekonomian, dan estetika mampu terpenuhi dan dapat selaras dengan keragaman budaya, alam, dan faktor lainnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan ini dilaksanakan dengan cara yang harmonis dengan melibatkan beberapa hal yaitu lingkungan lokal, masyarakat, kebudayaan, sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan dan tidak menjadi korban dari pembangunan pariwisata dan dapat berjalan dengan seimbang dengan melihat beberapa indikator yang harus diperhatikan sehingga kegiatan pariwisata ini dapat berjalan dengan tidak ada pihak yang dirugikan.

*World Commicion on Environment and Development* (WCED) juga menjelaskan bahwa konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi bagian

dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana inti dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan dalam jangka panjang, maka dengan demikian pengembangan pariwisata berkelanjutan juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kebermanfaatn dan pengelolaan sumber daya pariwisata untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang (Nurhadi dan Mardiyono, 2014). Pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa kondisi, yang *pertama* Kondisi dimana masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata harus berpartisipasi dengan aktif. *Kedua* menjadi pendidikan bagi masyarakat di lingkungan tersebut, pelaku industri, dan pengunjung atau wisatawan. *Ketiga* didukung dengan kualitas lingkungan alam, pengguna energi dan iklim mikro. *Keempat* adanya investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternatif (Yaman dan Mohd, 2004:584).

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip perencanaan dalam bidang pariwisata memiliki 2 cara. Cara yang pertama difokuskan pada sistem perencanaan administrasi dengan memfokuskan pada segi keuntungan dari kegiatan pariwisata tersebut. Cara yang kedua berkaitan dengan perencanaan partisipasi yang lebih terfokus dengan regulasi yang seimbang antara pembangunan dan perencanaan. Pada cara kedua ini, lebih menitikberatkan pada permasalahan lingkungan dan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya pembangunan pariwisata tersebut.

*Community Based Tourism* atau Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat merupakan implementasi pengembangan pariwisata dengan pendekatan pembangunan. Masyarakat yang berperan sebagai pelaku dalam

pembangunan pariwisata seharusnya mendapatkan manfaat yang banyak dari pariwisata di daerahnya. *Community Based Tourism* menekankan pada masyarakat untuk dapat mengelola dan mengembangkan objek pariwisata dengan mandiri dan berkelanjutan. Definisi *Community Based Tourism* adalah pariwisata yang dalam proses pengelolaannya melibatkan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki peran langsung dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata pun juga mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan *Community Based Tourism* ini masyarakat dituntut untuk bisa mengelola secara mandiri secara politis dan demokrasi dan dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata dapat disalurkan untuk membantu pembangunan di lingkungan tersebut.

Bentuk perwujudan dari konsep *Community Based Tourism* atau Pariwisata Berbasis Masyarakat ini adalah pengembangan objek pariwisata oleh masyarakat yang memiliki potensi dan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat. Potensi yang dimaksud adalah potensi kebudayaan lokal, sumber daya alam, dan sumber daya masyarakat lokal. Pengembangan objek-objek wisata oleh masyarakat ini dapat dilakukan dengan pengembangan desa-desa wisata yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di sekitar pariwisata. Desa wisata di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam salah satu pendorong perekonomian suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2018 terdapat 1.734 desa wisata yang tersebar di berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Salah satu daerah yang mengelola pariwisata dengan berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* adalah di Desa Samiran, Kecamatan

Selo, Kabupaten Boyolali dengan nama Desa Wisata Samiran Boyolali atau disingkat dengan Dewi Sambi.

Desa Samiran letak administrasinya berada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Desa Samiran memiliki kekayaan alam yang melimpah karena terletak di antara dua gunung yaitu Merapi dan Merbabu dan masuk kedalam zona penyangga dari hutan Taman Nasional Gunung Merapi-Merbabu (TNGMM). Dengan letak yang strategis diantara dua gunung, Desa Samiran memiliki potensi akan pariwisata yang sangat tinggi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat, masyarakat Desa Samiran beserta pemerintah berupaya membuat regulasi untuk bisa meningkatkan perekonomian warga setempat dengan cara membangun Desa Wisata.

Menurut Zakaria dan Rima, (2014:246) definisi Desa Wisata dapat diuraikan sebagai :

“Suatu wilayah yang menawarkan potensi dari keseharian masyarakat, seni budaya, adat istiadat, arsitektur tradisional, dan struktur tata ruang desa yang disajikan dalam sebuah integrasi pariwisata seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas yang mendukung berjalannya pariwisata. Namun tidak semua desa mampu diberi nama desa wisata, suatu wilayah harus memenuhi komponen-komponen sebagai syarat untuk bisa disebut sebagai desa wisata.”

Menurut Gumelar, (2010) suatu desa dapat digolongkan sebagai desa wisata memiliki keunikan atau keaslian. Kemudian letak dari desa tersebut berdekatan langsung dengan daerah alam yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Selanjutnya memiliki kearifan di dalam masyarakat adat ataupun kelompok masyarakat yang mampu menarik minat pengunjung untuk datang. Komponen yang

terakhir adalah didukung dengan berbagai sarana dan prasarana dasar sehingga mampu menunjang keberjalannya pariwisata kedepan.

Desa Wisata Samiran atau Dewi Sambi memiliki potensi destinasi desa wisata dengan menawarkan potensi alam, budaya, adat istiadat masyarakat setempat. Potensi tersebut akhirnya mampu memberikan daya tarik kepada wisatawan untuk hadir dan menikmati keragaman potensi yang ada. Secara hukum, Desa Wisata Samiran atau Dewi Sambi telah diresmikan pada tahun 2009 melalui SK Bupati pada tahun 2009 dengan Pokdarwis Guyub rukun sebagai pengurus utama Desa Wisata Samiran. Desa Wisata Samiran memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat di lingkungan Desa Samiran terutama dalam segi perekonomian. Seperti apa yang disampaikan oleh Andriani dan Wibowo, (2020:85) bahwa perubahan-perubahan tersebut muncul secara perlahan, dengan menjadi tolak ukur adalah semakin banyaknya fasilitas yang memadai untuk memadai para wisatawan seperti pembangunan dan pengembangan Homestay disana. Hal tersebut juga bisa dilihat dari grafik jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Samiran dalam beberapa tahun kebelakang yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Wisatawan Desa Samiran Tahun 2011-2019**



Sumber : Pemerintah Desa Samiran, 2020

Dapat kita simpulkan sesuai grafik diatas bahwa terjadi peningkatan dan penurunan kunjungan wisatawan. Pada tahun 2018 menjadi tahun tertinggi dimana wisatawan lokal dan tahun 2010 menjadi tahun tertinggi wisatawan mancanegara yang mengunjungi ke Desa Wisata Samiran. Kenaikan pengunjung pada tahun 2010 dan 2018 disebabkan karena terjadinya peristiwa meletusnya gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi dapat menarik perhatian dari pengunjung untuk melihat bagaimana kondisi pemukiman warga setelah terjadinya erupsi.

Dalam melaksanakan pembangunan pariwisata membutuhkan peranan dari *stakeholder* luar seperti pemerintah daerah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan-perusahaan swasta. Namun, dari beberapa *stakeholder* tersebut yang memiliki peran sangat signifikan dalam pembangunan pariwisata adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menjalankan segala urusan mengenai kebutuhan pariwisata seperti penyediaan infrastruktur dan regulasi pariwisata itu. Hal ini selaras dengan apa yang sudah tercantum dalam pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan

pemerintah daerah memiliki keharusan dalam terus menjalankan roda perekonomian di sekitaran tempat pariwisata terutama untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, hingga koperasi. *Kedua*, pemerintah wajib memberikan sarana infrastruktur yang layak untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, hingga koperasi dengan usaha besar.

Dalam mendukung pengelolaan Desa Wisata Samiran, Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemerintah Daerah Boyolali telah mengeluarkan SK pembentukan Desa Wisata dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Boyolali 552/881/1/17/Tahun 2009 sehingga Desa Wisata Samiran sudah diakui secara hukum. Desa Wisata Samiran terus bertransformasi dari tahun 2009 menjadi desa yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan dengan pengelolaan pariwisatanya yang menggunakan konsep *Community Based Tourism*. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana *Community Based Tourism* dapat berjalan di Desa Wisata Samiran, dan juga bagaimana peranan dari pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Wisata Samiran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Desa Wisata Samiran Boyolali dengan Konsep *Community Based Tourism*?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan Desa Wisata Samiran Kabupaten Boyolali?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah ;

1. Mampu mengetahui pengelolaan *Community Based Tourism* atau Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Samiran Boyolali.
2. Mampu memahami peran Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan *Community Based Tourism* atau Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Samiran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan kaitan topik dan tema yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan berkelanjutan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan khususnya mengenai *Community Based Tourism*, serta sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan khususnya yang telah dipelajari dibidang Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unniversitas Diponegoro.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dimampu dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori dan Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Erna Marlia Susfenti	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Sukajadi Kecamatan Carita.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah <i>Community Based Tourism</i> dan Pengembangan Desa Wisata.	Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan desa wisata ini masih terlihat dominan, dengan acuan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki fungsi sebagai fasilitator sedangkan yang menjalankan kegiatan pariwisata adalah masyarakat. Pengembangan <i>Community Based Tourism</i> sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang aktif dan tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

2	Wiwiek Rabiatul Adawiyah	Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Papringan	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan teori <i>Community Based Tourism</i>	Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penelitian ini membantu pemerintah daerah setempat dalam memetakan potensi wisata, mengantisipasi kendala serta usaha dalam mewujudkan desa wisata yang mampu memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat di Papringan.
---	--------------------------	---	---	--

### 1.5.2.1 Desa Wisata

Desa Wisata merupakan wilayah desa yang menjadi cerminan keaslian dan keasrian dari suatu desa, baik dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan kegiatan masyarakat yang memiliki keunikan sehingga menarik perhatian dari wisatawan untuk datang dan berkunjung ke desa tersebut (Hadiwijoyo, 2012). Menurut Dewi, (2013,131) menjelaskan desa wisata merupakan jenis wisata di mana sekelompok kecil pengunjung tinggal di sekitaran kehidupan konservatif atau di desa yang tersisih dengan mempelajari mengenai kehidupan desa sekitar.

Menurut Mahardika, (2001:25) pemerintah dan NGO (*non government organization*) memainkan tiga peranan dan langkah dalam proses pembentukan desa wisata, diantaranya:

1. Kesadaran (*conscientization*), dengan adanya kesadaran, masyarakat dapat menyadari akan adanya potensi dari lingkungannya tersebut sehingga dapat

dikembangkan menjadi desa wisata yang dapat mereka kelola secara mandiri. Namun terlebih dahulu perlu adanya pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana mengembangkan potensi yang ada di lingkungan mereka agar menjadi pariwisata yang menguntungkan. Dalam pengelolaan Desa Wisata Samiran, pada mulanya masyarakat perlu memiliki kesadaran terlebih dahulu akan potensi yang ada di Desa Samiran. Peran dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif. Kesadaran masyarakat dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat merupakan modal utama dalam pengembangan pariwisata.

2. Mobilisasi Masyarakat (*community mobilization*), merupakan usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat sekitar mengenai kemampuan dari diri mereka, keadaan lingkungan mereka, dan memobilisasi masyarakat untuk bereaksi terhadap persoalan yang ada dan memenuhi kebutuhan mereka melalui optimalisasi ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat merupakan aspek yang signifikan dalam memastikan kelangsungan pembangunan desa wisata dalam jangka panjang.
3. Penghantaran Sumber Daya Manusia, yaitu membantu masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Desa wisata pada umumnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal sekitarnya. Selain itu,

pengelolaannya dilatarbelakangi oleh masyarakat sekitar yang berupaya memaksimalkan potensi ketersediaan sumber daya alam, sumber daya budaya, sejarah, ekonomi, sosial, dan tata letak. Ringkasnya, desa wisata adalah desa berpotensi untuk dikembangkan secara bersamaan oleh pemerintah dan masyarakatnya.

### **1.5.1.3 *Community Based Tourism***

Menurut Rizkianto dan Topowijoyo, (2018:23) *Community Based Tourism* merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan pariwisata dengan melakukan pendampingan secara bertahap. *Community Based Tourism* ini berhubungan langsung dengan partisipasi masyarakat yang berperan sebagai aktor penggerak kemajuan pariwisata yang ada.

*Community Based Tourism* memberikan kesempatan dalam manajemen dan memberdayakan pariwisata secara politis baik bagi yang memiliki interaksi langsung dengan industri pariwisata ataupun tidak agar dapat melakukan perekapan dana keuntungan dengan adil dari kegiatan pariwisata (Nurhidayati, 2007:23). Masyarakat sekitar harus berperan serta secara aktif dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam semua tahapan pembangunan, mulai kegiatan merencanakan, membangun, mengelola, mengembangkan, dan monitoring, serta melakukan penilaian. Hal tersebut dikarenakan tujuan akhir yang ingin dicapai berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar (Demartoto, 2009).

Masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan *Community Based Tourism* terlibat dalam semua tahap pembangunan. Masyarakat ini dapat berperan sebagai evaluator, investor, pelaksana, pemantau, pengelola, dan sekaligus perencana pembangunan dalam pengembangan *Community Based Tourism*. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembangunan pariwisata berbasis pariwisata atau *Community Based Tourism* ini membutuhkan peran dari pemangku kepentingan setempat yaitu Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata terbagi menjadi dua yaitu yang *pertama* mengenai peran anggota masyarakat dalam menentukan keputusan dalam setiap kegiatan pariwisata. *Kedua*, peran masyarakat dalam melakukan manajemen keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata. Dari dua peran partisipasi masyarakat ini, didapatkan tiga prinsip strategi dalam upaya pembangunan *Community Based Tourism* yaitu pertama, masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Dalam *Community Based Tourism* ini lebih menekankan pada peran dari masyarakat, jika dilihat dari penelitian adalah masyarakat di Desa Wisata Samiran Boyolali. Bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan di Desa Wisata Samiran seperti dalam menentukan potensi pariwisata yang akan dikembangkan, alokasi anggaran pengelolaan objek wisata, dan pola kemitraan yang akan dikembangkan nantinya.

Kedua, terdapat kepastian masyarakat lokal dalam menerima manfaat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini tentunya melibatkan masyarakat di dalamnya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari kegiatan pariwisata ini adalah terdapat manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang dapat dirasakan oleh

Masyarakat Desa Samiran seperti meningkat pendapatan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat local, membuka lapangan kerja, dan dapat mendorong pertumbuhan industry pariwisata di sekitar Desa Wisata Samiran. *Ketiga*, pemberian edukasi mengenai pariwisata kepada masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal bisa paham mengenai potensi yang ada di wilayah mereka sehingga mampu mengembangkannya menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar menurut (Rizkianto dan Topowijoyo, 2018:23)

Maka dari itu, dalam menganalisis *Community Based Tourism* di Desa Wisata Samiran Boyolali digunakan beberapa prinsip dan indikator yang dikembangkan oleh (Suansri, 2003:20). Menurut Suansri (2003:14), dalam bukunya menyebutkan bahwa *Community Based Tourism* adalah sebagai berikut :

*“Community based tourism is tourism that takes environmental, social, and cultural sustainability into account. It is managed and owned by the community, for the community, with the purpose of enabling visitors to increase their awareness and learn about the community and local ways of life”.*

Menurut Suansri (2003:20) terdapat 5 prinsip dalam pengembangan *Community Based Tourism* :

1. Ekonomi

Dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) ini harus dapat mendorong perekonomian di lingkungan Desa Wisata. Masyarakat yang merupakan aktor dari aktivitas pariwisata ini dapat mengembangkan pariwisata di Desa Wisata dan kemudian memberikan dampak positif dalam segi ekonomi seperti meningkatnya nilai pendapatan masyarakat desa

wisata, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, dan masyarakat/komunitas dapat mengembangkan pariwisata ini secara mandiri.

## 2. Sosial

Dalam prinsip sosial ini lebih ditekankan pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang disebabkan oleh adanya aktivitas pariwisata di desa wisata. Mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia ini dapat dilakukan melalui wadah/komunitas yang disediakan oleh desa wisata seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selain itu, dalam mengelola kegiatan pariwisata ini diharapkan masyarakat mampu melakukan pembagian peran sesuai dengan gender dan keahlian.

## 3. Budaya

Aktivitas pariwisata memberikan kebebasan masyarakat untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerah mereka. Salah satu yang dapat dimaksimalkan adalah kebudayaan lokal yang merupakan warisan dari leluhur terdahulu yang harus dilestarikan. Melalui aktivitas pariwisata diharapkan kebudayaan lokal dapat dikenal luas oleh masyarakat daerah maupun mancanegara sehingga kebudayaan tersebut tidak punah.

## 4. Lingkungan

Lingkungan menjadi indikator yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Lingkungan menjadi salah satu faktor pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keseimbangan antara lingkungan dengan perkembangan pariwisata harus tetap dijaga agar kedepannya tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat lokal. Manajemen pengelolaan

sampah hingga perawatan bangunan-bangunan cagar alam menjadi indikator keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di desa wisata.

## 5. Politik

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengembangan pariwisata. Perlu adanya manajemen sumber daya manusia untuk memaksimalkan kinerja dari masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata juga menjadi indikator keberhasilan pengelolaan pariwisata. Melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai wadah masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan prinsip diatas, dapat diketahui bahwa Community Based Tourism ini merupakan salah satu konsep pariwisata yang melibatkan berbagai macam aspek sehingga pariwisata yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dapat memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat lokal.

### **1.5.1.4 Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata**

Menurut Sari, (2009:106) menjelaskan bahwa peran diartikan sebagai gambaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem dan menjadi suatu kewajiban perilaku bagi setiap individu atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Sedangkan menurut pendapat dari Soekanto, (2001:212) menjelaskan bahwa peranan merupakan proses seseorang ketika menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan pangkatnya dan kemudian menjalankan sesuai dengan porsi atau peranannya. Peranan dan kedudukan walaupun memiliki perbedaan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena memiliki berbagai

keterkaitan. Seperti apa yang disampaikan oleh Soekanto, (2001:213) bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diartikan bahwa peran pemerintah diartikan sebagai fungsi aklimatisasi yang dilaksanakan oleh suatu individu dalam kelompok atau organisasi dalam suatu tatanan sosial. Jika pengertian tersebut dikaitkan dalam aktivitas pemerintahan dapat diartikan fungsi aklimatisasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan segala tugas dan wewenangnya di tingkat daerah maupun nasional diartikan sebagai peran pemerintah.

Menurut pendapat Pitana dan Gayatri, (2005:95) menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata daerahnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Motivator

Peran Pemerintah Daerah memiliki tujuan agar keberjalanan kegiatan pariwisata ini dapat berjalan terus beroperasi. Sasaran utama dari kegiatan pariwisata adalah masyarakat, investor, serta pengusaha di bidang pariwisata. Hal ini dapat menjadi alasan untuk memberikan motivator agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan optimal. Seperti halnya yang terjadi di Desa Wisata Samiran, perlu adanya motivasi dari Pemerintah Daerah Boyolali agar kegiatan pariwisata di Desa Samiran dapat terus berjalan dengan baik. Dengan adanya target yang harus dipenuhi, pengelola pariwisata di Desa Wisata Samiran dapat termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pariwisata.

## 2. Fasilitator

Pemerintah Daerah Boyolali selaku fasilitator berjalannya pariwisata di Desa Wisata Samiran menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung segala kegiatan pariwisata. Pemerintah Daerah Boyolali juga dapat bekerja sama dengan menggandeng berbagai pihak seperti swasta untuk meningkatkan fasilitas pariwisata yang ada.

## 3. Dinamisor

Sinergitas antara masyarakat dan swasta dapat menciptakan pilar *good governance*, dan pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak tersebut agar tercipta suatu kondisi yang saling menguntungkan untuk semua pihak terutama untuk keberjalanan pariwisata di Desa Samiran Boyolali.

Selain pembangunan secara fisik, dalam mewujudkan pariwisata yang baik dan bisa memberikan rasa puas bagi pengunjung, diperlukan koordinasi dan manajemen organisasi yang baik. Peran manajemen organisasi dalam pengelolaan pariwisata sangatlah diperlukan karena untuk menunjang potensi dari daerah wisata sehingga mampu menarik perhatian bagi wisatawan.

Peran organisasi pariwisata dalam hal ini merupakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Boyolali memiliki peran yang penting terutama dalam hal melakukan koordinasi terhadap semua lini dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Samiran, sehingga harapannya terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pemerintah utamanya pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Desa Wisata Samiran.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Study Case*. Menurut Rahardjo, (2017) *study case* merupakan rangkaian kegiatan penelitian mengenai suatu kegiatan, peristiwa atau kejadian, aktivitas yang dilakukan oleh manusia individu maupun kelompok yang dilakukan secara intensif untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dari kegiatan tersebut. Informasi yang didapatkan bisa melalui observasi, dokumen, laporan, atau wawancara.

### **1.6.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “*Community Based Tourism* Dalam pengelolaan Desa Wisata Samiran di Kabupaten Boyolali”. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan Desa Wisata Samiran yang pengelolaannya dilakukan berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism*. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini memfokuskan mengenai siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata tersebut, bagaimana peran masing-masing aktor dalam pengelolaannya utamanya adalah peran dari masyarakat lokal Desa Samiran, pihak swasta, dan pemerintah daerah setempat.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian menjadi salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Wisata Samiran, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, serta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali.

#### **1.6.4 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan orang atau tokoh yang membantu dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian (Moleong, 2010:132). Penelitian ini menggunakan informasi yang berasal dari :

1. Pekerja dan Penggiat di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Boyolali.
2. Pengurus Desa Wisata Samiran Boyolali
3. Tokoh Masyarakat dan masyarakat lokal Desa Samiran Boyolali

Dalam penelitian ini, strategi pengambilan informan dilakukan dengan cara Prosedur Purposif. Menurut Burhan, (2014:107) menjelaskan metode purposif merupakan teknik yang melibatkan partisipan yang akan bertindak sebagai informan dengan kriteria yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kunci utama dari prosedur purposif ini adalah tokoh-tokoh penting di dalam proses sosial harus memiliki akses secara langsung kepada informan terkait peristiwa yang terjadi.

#### **1.6.5 Sumber Data**

Menurut Herdiansyah, (2010:8-10) data kualitatif dapat berwujud frasa deklaratif, uraian, atau penjelasan yang mencakup mengenai makna/nilai tertentu yang diperoleh melalui alat penambangan data seperti dokumentasi, interview, dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sarwono, (2006:209) menjelaskan bahwa data primer berbentuk berupa hasil dari teknik wawancara yang diberikan oleh informan langsung kepada

peneliti. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan yang mencakup Desa Wisata Samiran Boyolali dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Boyolali.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder memiliki isi berupa data yang didapatkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik membaca, mendengarkan, melihat dari sumber-sumber kedua dan biasanya berasal dari data primer yang telah diolah atau diedit oleh peneliti lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari literatur dan sumber-sumber lainnya yang meliputi jurnal, skripsi, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **1.6.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Menurut Sugiyono, (2010:157) menjelaskan bahwa teknik wawancara digunakan dengan tujuan untuk melakukan dan menemukan permasalahan yang harus dicari dalam penelitian dan dibantu oleh responden yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Wawancara hanya dapat mendapatkan responden dalam jumlah kecil. Menurut (Moleong, 2010:186) menerangkan bahwa wawancara adalah proses percakapan dari pewawancara dan terwawancara dengan memiliki tujuan yang akan dicapai.

#### b. Observasi

Menurut Sugiyono, (2010:167) menjelaskan dalam teknik observasi ini merupakan teknik dimana peneliti melakukan proses-proses pengamatan penelitian

secara langsung dilapangan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yaitu peneliti itu yang dibanru dengan pedoman observasi. Kegiatan yang diamati secara langsung adalah kegiatan pariwisata di Desa Wisata Samiran Boyolali.

c. Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi, (2009:158) teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menghasilkan ulasan krisis terkait permasalahan penelitian yang ada, memungkinkan pengumpulan data secara lengkap, terbukti kebenarannya, dan tidak menduga-duga. Dokumentasi bertujuan untuk menghimpun data yang tidak didapatkan melalui wawancara yaitu berupa foto, rekaman suara, video, catatan-catatan dan data-data statistik yang mendukung sebagai bahan validasi penelitian.

### **1.6.7 Teknik Analisis Data**

Setelah mendapatkan data yang diinginkan oleh peneliti, data tersebut diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut :

a. Tahap Pengumpulan Data

Menurut Herdiansyah, (2010:164) tahap pengumpulan data ini dilakukan sebelum melaksanakan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data-data dikumpulkan di awal dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu di lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan disertai dengan dokumentasi untuk memperkuat data-data penelitian.

b. Reduksi Data

Tahap reduksi data ini merupakan tahap dimana peneliti menyaring, mengelompokan, menyisihkan data-data yang sekiranya tidak diperlukan, dan

mengumpulkan data-data yang penting untuk dilakukan pengambilan kesimpulan. Data-data yang didapatkan tersebut ditulis dalam laporan catatan hasil wawancara dan hasil observasi.

c. Tahap Penyajian Data

Menurut Idrus, (2009:151) menjelaskan bahwa dalam proses penyajian data ini, informasi yang telah didapatkan oleh peneliti dan memungkinkan untuk ditarik kesimpulannya. Tujuan dari tahap ini adalah agar peneliti dapat lebih memahami mengenai apa yang telah dilaksanakan apa yang harus dilaksanakan selanjutnya. Setelah melaksanakan tahap reduksi data, peneliti dapat menyusun dan menyajikan data terkait pengembangan Desa Wisata Samiran Boyolali.

d. Tahap penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Idrus, (2009:151) menjelaskan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan sebuah laporan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dicari oleh peneliti dalam penelitiannya. Setelah jawaban ditemukan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memahami makna dari penelitian, isi, dan proposisi dari penelitian tersebut. (Herdiansyah, 2010:179).